BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi di Indonesia, terutama dalam sektor keuangan, sangat didukung oleh berbagai lembaga keuangan. Sektor keuangan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam ekonomi masyarakat modern. Usaha mikro memegang peran penting dalam perekonomian, meskipun hingga saat ini sulit untuk berkembang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses bagi pengusaha mikro, terutama yang berasal dari lapisan masyarakat bawah, yang sering dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, terutama lembaga keuangan konvensional. Sebagai akibatnya, pertumbuhan usaha mikro terhambat. (Suprayugo, 2022)

Lembaga keuangan syariah mengoperasikan bisnisnya dengan merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadits, sementara prinsip filosofisnya didasarkan pada ekonomi syariah yang memiliki satu target, tiga pilar, dan empat landasan. Target tunggal tersebut adalah mencapai kesuksesan yang sejati dalam aktivitas ekonomi, yang meliputi pencapaian kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (rohani) dan kemakmuran (materi). 3 pilarnya meliputi a) aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, spekulatif, dan kesewang-wenangan, b) adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan *risk return*, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual, material dan azas manfaat, kelestarian lingkungan, c) orientasi pada kemaslahatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal. Empat fondasinya adalah a) menempatkan kerangka kerja bisnis dalam kerangka kebersamaan global untuk meraih kesuksesan bersama, b) prinsip-prinsip hukum muamalah dalam ekonomi yang memandu kegiatan ekonomi agar selalu sejalan dengan prinsip syariah, c) moralitas yang membimbing kegiatan ekonomi dengan memprioritaskan kebaikan sebagai sarana mencapai tujuan, d) kesadaran akan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menegaskan bahwa setiap tindakan manusia memiliki tanggung jawab

kepada Tuhan, sehingga meningkatkan integritas yang sejalan dengan prinsip *good corporate governance* dan *market discipline*. (Latif, 2020)

Seperti yang dikenal, bank adalah suatu institusi yang menjalankan tiga peran inti, yaitu menerima simpanan dana, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan transfer dana. Dalam hukum Islam (Fiqih Islam), istilah "bank" tidak secara eksplisit disebutkan, namun sejarah menunjukkan bahwa fungsi-fungsi perbankan telah diamalkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Praktikpraktik perbankan ini secara bertahap berkembang, mengalami kemajuan dan kemunduran sesuai dengan perkembangan peradaban manusia dari waktu ke waktu.

Bank syariah, dalam konteks ini, merujuk pada lembaga keuangan Islam yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang meliputi perjanjian (akad) antara bank dan nasabah sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan utama antara bank Islam (syariah) dan bank konvensional terletak pada prinsipprinsip dasarnya, di mana bank Islam tidak menggunakan bunga sebagai prinsip operasinya, tetapi mengadopsi prinsip bagi hasil, jual-beli, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam. (Maharani & Hidayat, 2020)

Tujuan pemerintah dalam mendirikan bank syariah tidak hanya terbatas pada penyediaan alternatif perbankan tanpa bunga bagi masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk memperluas pengembangan sektor riil. Hal ini sesuai dengan konsep bank syariah sebagai institusi keuangan yang memfasilitasi proses dalam sektor riil melalui berbagai aktivitasnya, khususnya dalam pembiayaan mudharabah yang berlandaskan prinsip syariah. Jenis pembiayaan yang tersedia di bank syariah beragam, mulai dari pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, hingga pembiayaan transaksi jual-beli murabahah, serta pembiayaan yang bersifat sosial atau kebajikan qardh. (Rifa'i, 2017)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan suatu cabang dari lembaga keuangan syariah yang fokus pada pendanaan dan pembiayaan bagi sektor riil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang ketentuan umum, BPRS adalah bank syariah yang tidak menyediakan layanan dalam proses pembayaran.

Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasakan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pemahaman tentang pembiayaan di sini merujuk pada alokasi dana yang disediakan oleh satu entitas kepada entitas lain untuk mendukung proyek investasi yang telah dipersiapkan, baik oleh individu maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah penyaluran dana yang ditujukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Ekonomika & Mada, 2017)

BPRS Haji Miskin didirikan pada tahun 2006 dan berlokasi di Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, sebagai pusat operasionalnya. BPRS Haji Miskin menawarkan beragam produk perbankan. Salah satu layanan yang disediakan oleh bank syariah adalah sebagai perantara antara pemilik dana (pemegang saham) dan penerima dana (*investor*) dengan pihak yang membutuhkan modal atau dana (pengusaha dan konsumen).

Di BPRS Haji Miskin, mereka menawarkan berbagai produk pendanaan dan pembiayaan. Produk pendanaan mencakup berbagai jenis seperti deposito, tabungan ummat, tabungan pendidikan, tabungan walimah, tabungan wadi'ah, tabungan haji, dan tabungan qurban. Sementara itu, produk pembiayaan mencakup pembiayaan murabahah (transaksi jual-beli dan konsumtif), pembiayaan mudharabah dan musyarakah (berbasis bagi hasil), pembiayaan piutang transaksi multi jasa atau ijarah (sewa), al-qardh (pinjaman tanpa bunga), dan qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga dengan tujuan baik).

BPRS Haji Miskin mempunyai visi Menjadikan BPR Syariah Haji Miskin sebagai “panutan bank pembiayaan rakyat syariah di Sumatera Barat”, dan mempunyai misi “Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi rakyat Indonesia di masa depan”. Pendirinya juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberikan sebuah lembaga keuangan sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yang sehingga akan tercapai masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan syariat Islam

Salah satu produk pada PT. BPRS Haji Miskin yang paling banyak diminati nasabah ialah pembiayaan murabahah (jual beli). Karena dilihat dari prosedurnya, pemberian dan pengembalian pembiayaan ini cukup mudah dipahami oleh

karyawan ataupun nasabah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah.

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah pada Produk Pembiayaan di BPRS Haji Miskin Kota Padang Panjang

No	Produk	Jumlah Nasabah
1	Murabahah	2.965 Orang
2	Mudharabah	0 Orang
3	Musyarakah	4 Orang
4	Ijarah	45 Orang
5	Qardhul Hasan	203 Orang
	Jumlah Nasabah	3.217 Orang

Sumber: Data BPRS Haji Miskin Tahun 2022

Murabahah merupakan produk pembiayaan dimana perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin/keuntungan yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Pada pembiayaan murabahah sangat rentan terjadinya pembiayaan bermasalah karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan umum yang disesuaikan dengan pendapatan nasabahnya apabila pendapatan nasabah menurun atau usaha yang dijalankannya mengalami penurunan maka akan berdampak pada penyelesaian angsurannya, berbeda pada pembiayaan Ijarah multijasa yang diperuntukkan untuk PNS yang mengandalkan sertifikasi setiap 3 bulan pendapatan nasabah sudah bisa

dipastikan dalam pembayaran angsurannya dalam pembiayaan ijarah multijasa ATM nasabah tersebut sebagai jaminan pihak bank. (Rohmah, 2018)

BPR Syariah Haji Miskin merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari suatu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah pada BPR Syariah Haji Miskin adalah salah satunya pembiayaan murabahah yang ditunjukkan oleh kredit macet atau rasio *Non Performing Financing* (NPF). Tabel di bawah ini menunjukkan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah BPRS Haji Miskin

Tabel 1. 2 Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah BPRS Haji Miskin Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2022

Tahun	Jumlah Nasabah (Orang)	Total Pembiayaan (Rp)	Jumlah Nasabah Bermasalah	Pembiayaan Bermasalah (Rp)	NPF (<i>Non Performing Financing</i>) (%)
2019	1.850 orang	42.524.869.380	94 orang	1.231.493.896	2,89%
2020	1.632 orang	47.561.606.797	129 orang	1.465.536.210	3,08%
2021	1.725 orang	53.527.103.789	139 orang	1.530.414.223	2,85%
2022	2.965 orang	54.502.865.983	57 orang	1.127.823.345	2,06%
Total	8.172 Orang	198.116.445.949	419 Orang	5.355.267.674	10,88%

Sumber: Data diolah tahun 2022, BPRS Haji Miskin

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) pada tahun 2020 di BPRS Haji Miskin mengalami kenaikan sebesar 3,08%. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 2,06%.

Pembiayaan bermasalah dapat merugikan BPRS Haji Miskin baik secara finansial maupun non finansial.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Sedangkan dalam Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa Ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (QS An Nisa: 29).

Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah menuju stabilitas dan perbaikan neraca keuangan. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan bahaya di masa mendatang.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas secara mendalam mengenai **“ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BPR SYARIAH KOTA PADANG PANJANG”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BPRS Haji Miskin?
2. Bagaimana dampak pembiayaan bermasalah terhadap BPRS Haji Miskin Kota Padang Panjang?
3. Bagaimana cara yang dilakukan BPRS Haji Miskin terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BPRS Haji Miskin
2. Untuk mengetahui dampak pembiayaan bermasalah pada BPRS Haji Miskin Kota Padang Panjang
3. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BPRS Haji Miskin Kota Padang Panjang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penelitian yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BPRS Haji Miskin Kota Padang Panjang dalam melakukan proses penanganan pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah.